

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input checked="" type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 16	TAHUN 200

TAJUK

Tunggakan Listrik Pelanggan PLN

Jumlah tagihan tunggakan listrik yang ada di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) amat memprihatinkan. Karena nilainya mencapai Rp 1 triliun lebih. Lalu yang lebih memprihatinkan, sebagian besar penunggak itu justru berasal dari kelompok pelanggan industri menengah ke atas. Menurut catatan PLN, untuk tingkat nasional terdapat sekitar 600 pelanggan dari golongan menengah ke atas memiliki tunggakan mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Dan dari jumlah itu wilayah Jakarta dan sekitarnya Rp 400 miliar.

Barangkali kalau mendengar alasan mengapa kelompok industri itu mengunggak pembayaran tarif listrik kita mesti mengangguk mklum. Menurut Direktur Niaga PT PLN Sunggu Aritonang, para penunggak itu pernah minta keringanan kepada PLN dengan alasan kondisi ekonomi. Tidak dijelaskan kapan permintaan keringanan tersebut, tapi jika mematat-matut, maka pastilah permintaan itu terjadi pada saat puncak krisis, sekitar 5-6 tahun lalu. Saat krisis itu, memang hampir semua orang terpukul. Harga-harga bahan produksi dan ongkos produksi jadi meningkat. Dan tentu saja dalam kondisi seperti itu, menunda pembayaran adalah satu cara yang paling mungkin dilakukan.

Tapi untuk saat sekarang persoalannya jadi berbeda. Tak pantas lagi, kelompok menengah atas menunggak tagihan listrik dari PLN. Bukankah sekarang bisnis sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bukankah kelompok menengah atas tersebut sudah dapat meraih untung lagi dari bisnisnya. Hingga dalam hal ini PLN pun tak boleh pilih kasih dalam menangani para penunggak tersebut. Jika pelanggan kelas teri yang menunggak pembayaran listrik sebulan saja, maka PLN akan langsung memutus aliran listrik penunggak tersebut. Lantas kalau toh, bulan selanjutnya masih menunggak, maka PLN akan mencabut peralatan di tempat penunggak. Dalam hal ini, jika penunggak ingin memperoleh pasokan listrik, harus mendaftarkan lagi ke PLN.

Mestinya para penunggak pembayaran tarif listrik kelas kakap itu diperlakukan sama seperti yang kelas teri. PLN harus bersikap tegas, setegas kepada pelanggan kelas teri. Dan kita pantas berbesar hati, ketika Sunggu mengatakan bahwa PLN akan tegas kepada penunggak kelas kakap tersebut. PLN akan memutus aliran listrik dan membongkar, apabila dalam jangka waktu tertentu tunggakan tidak dibayar, tanpa menghapus kewajiban terkait. Bahkan PLN berniat mengumumkan secara terbuka ke publik siapa saja para penunggak tersebut. Dan jika upaya itu tak juga membawa hasil, maka PLN akan menggunakan jalur pengadilan.

Rencana langkah PLN tersebut pantas diacungi jempol. Sebab sepanjang sejarah negeri ini, jarang sekali terjadi keberpihakan terhadap kelas teri. Kelas ini begitu mudah dijadikan permainan dan sasaran tembak. Sementara kelas atas dengan beribu alasan seolah selalu mendapat *privilege*. Bahkan menagih hak kita dengan cara sama seperti kita menagih hak kepada masyarakat kelas bawah, dianggap dapat menyinggung harga diri. Sudah saatnya PLN menyamakan status semua pelanggan dalam membayar kewajiban. □

MONITOR BERITA

I

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 200

Amoseas Kembangkan Proyek Panas Bumi di Indonesia

JAKARTA — PT Amoseas Indonesia akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia sesuai dengan prinsip mekanisme pembangun bersih (*clean development mechanism/CDM*). PLTP dinilai sebagai proyek ramah lingkungan dan paling rendah tingkat pencemarannya.

Presiden Amoseas Indonesia Bernie McCloskey mengatakan, jumlah karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan energi panas bumi lebih rendah dari yang dihasilkan pembangkit berbahan batu bara untuk setiap kilowatt per jam (kWh). "Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan bersih di dunia dan pengembangan energi terbarukan sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Kelistrikan," ujarnya akhir pekan lalu. Amoseas menilai proyek panas bumi di Indonesia sangat menguntungkan.

Menurut Bernie, pihaknya kini tengah melakukan kajian untuk mengembangkan proyek panas bumi Darajat 3. Sebelumnya anak perusahaan ChevronTexaco itu telah mengembangkan PLTP Darajat 1 dan 2 berkapasitas masing-masing 55 dan 75 megawatt (MW) dari konsesi pengembangan 330 MW. Namun, dia menolak menjelaskan mengenai biaya investasi yang akan ditanamkan.

Saat ini pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan PT Pertamina (Persero) mengenai rencana pengembangan proyek Darajat 3. Sementara untuk penjualan listrik, Amoseas akan membicarakannya dengan PT PLN (Persero). "Kami belum bisa mengungkapkan berapa tarif yang akan kami jual, karena masih dalam negosiasi," ujar Bernie.

Mengenai kemungkinan menggunakan dana CDM untuk mengembangkan, Bernie mengatakan, kemungkinan tersebut tetap ada. Hanya saja, hingga saat ini, Amoseas masih memfokuskan kajian secara mendalam mengenai proyek panas bumi di Indonesia. "Kami menilai pengembangan panas bumi di Indonesia sangat menjanjikan," katanya. ● ali nur yasin

1

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN : 12	TAHUN 200

Tiga Proyek Pembangkit PLN Berindikasi Korupsi

JAKARTA (Suara Karya) : Tiga proyek pembangkit listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai tidak transparan, berindikasi korupsi dan mengabaikan prinsip optimasi sistem

"Tiga proyek pembangkit listrik milik PT PLN beserta anak perusahaannya dilaksanakan tanpa proses yang transparan, membuka kesempatan terjadinya 'pat-gulipat', penyelewengan, dan berpotensi merugikan publik di kemudian hari," demikian pernyataan Fabby Tumiwa, koordinator kelompok masyarakat keetenaga listrikan (WG-PSR) menanggapi keberlanjutan tiga proyek pembangkit listrik yaitu PLTGU Pamaran, PLTU Cilacap, dan PLTG Cilegon, yang diterima *Suara Karya* pekan lalu.

Sebelumnya, Dirut PLN, Eddie Widiono mengatakan, pembangunan tiga proyek pembangkit listrik akan tetap dilanjutkan. Pasalnya keberadaan ketiga pembangkit itu akan menambah pasokan listrik bagi sistem Jawa-Bali, serta menekan harga produksi listrik per kilo Watt hour (kWh). Selain itu, pengoperasian ketiga pembangkit listrik itu nantinya mampu memberikan penghematan sekitar Rp 6 triliun per tahun bagi PLN.

"Kita diperkirakan biaya produksi listrik PT PLN bisa ditekan

menjadi sekitar Rp 560 per kWh dari Rp 620 per kWh saat ini. Penurunan ini terjadi akibat adanya penghematan biaya bahan bakar," tegas Eddi. Namun, WGPSR menilai ketiga proyek pembangkit listrik tersebut memiliki kesamaan yaitu menabrak berbagai peraturan yang ada dan menciptakan inefisiensi perusahaan PT PLN, serta transparansi dan akuntabilitas tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk kasus pembangunan PLTGU Pamaran, katanya, PT Indonesia Power selaku anak perusahaan PT PLN telah melanggar ketentuan peraturan perundangan berkaitan dengan perizinan pembangunan pembangkit. Selain itu studi analisis dampak lingkungannya juga dinilai cacat dan lemah.

"PLTGU Pamaran diperkirakan akan memberikan beban baru bagi keuangan PT PLN dan PT Indonesia Power. Jika mulai beroperasi, PLTGU Pamaran akan membutuhkan biaya bahan bakar sebesar 22-23 juta dolar per tahun, dengan biaya pembangkitan rata-rata sebesar 6,74 sen dolar per kWh," bebarnya dalam siaran pers yang diterima *Suara Karya*, pekan lalu.

Solusi jangka pendek yang lebih optimal, katanya, adalah dengan membangun saluran transmisi udara 500 kV Banyuwangi-Gilimanuk

tetapi dioperasikan pada tegangan 150 kV. Saluran transmisi ini juga dapat menambah menambah keandalan jaringan kabel bawah laut Jawa-Bali yang ada saat ini.

"Solusi ini akan mengamankan pasokan listrik di Bali sebesar 200 MW, lebih tinggi dari PLTGU Pamaran yang hanya 135 MW. Jika dibandingkan dengan pembangunan saluran transmisi udara tersebut dan jika terjadi gangguan pada jaringan kabel listrik bawah laut yang ada sekarang, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk bahan bakar di semua pembangkit di Bali guna menjamin pasokan listrik sebesar 561.000 dolar per hari atau 204,7 juta dolar per tahun. Itu pun pasokan listrik di Bali masih dapat mengalami defisit sebesar 100 MW," katanya.

Sementara berkaitan dengan PLTU Cilacap, WGPSR berpendapat bahwa proyek tersebut tidak dibangun berdasarkan pertimbangan yang matang, mengabaikan *least cost principle* dan optimasi sistem.

"Pembangunan PLTU di Cilacap untuk mengatasi rendahnya tegangan listrik di wilayah Jawa bagian selatan kami nilai tidak tepat dan mengada-ada. Hal ini sebenarnya sudah dapat diatasi dengan pembangunan jaringan transmisi Jawa bagian selatan yang diperkirakan

rampung pada tahun 2006, bersamaan dengan jadwal operasi PLTU Cilacap," ucap Fabby.

Untuk PLTG Cilegon, Fabby menilai, biaya pembangkitan listrik PLTG Cilegon yang diklaim oleh PT PLN sebesar 3,3 cent dollar AS per kWh sesungguhnya meragukan.

"Kami memperkirakan dengan biaya EPC sebesar 600-700 dolar AS per kW, harga bahan bakar, gas di atas 2,5 dolar AS per MMBTU, dan skema pendanaannya adalah pinjaman komersial, maka biaya pembangkitan akan berkisar antara 4-4,5 sen dolar per kWh," jelasnya.

Secara umum, WGPSR menilai bahwa ada sejumlah indikasi korupsi, pelanggaran, penyelewengan dan 'pat-gulipat' dalam 3 proyek pembangkit listrik, yaitu PLTGU Pamaran, PLTU Cilacap, dan PLTG Cilegon. Pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung biaya akibat korupsi dan inefisiensi yang terjadi, dalam bentuk kenaikan harga listrik dan pembayaran hutang luar negeri.

"Pemerintah harus mengawasi lebih teliti dan melakukan audit menyeluruh proyek pembangkit listrik tersebut, sehingga tidak ada keraguan tindakan korupsi, penyelewengan dan pelanggaran hukum pada ketiga proyek tersebut," tegas Fabby. (CW-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB **MAR** APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 **15** 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2004

PT PLN Disjaya & Tangerang Kembangkan Call Center 123.

PT PLN Distribusi Jakarta Raya & Tangerang (Disjaya & Tangerang) terus meningkatkan pelayanannya kepada para pelanggan. Bekerjasama dengan PT Telkom Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor ketenagalistrikan itu meluncurkan Call Center dengan kode akses 123 (Call Center 123).

Peluncuran Call Center 123 tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT PLN Disjaya & Tangerang dan PT Telkom Tbk yang dilakukan oleh Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan (Diraga) PT PLN (Persero), Sunggu Anwar Aritonang dan Direktur Jasa PT Telkom Tbk, Suryatin Setiawan di Jakarta, kemarin.

Melalui Call Center 123 para pelanggan PLN Disjaya & Tangerang, dapat memperoleh informasi tagihan (*billing info*), informasi mengenai pemasangan baru dan perubahan, informasi pemadaman dan gangguan serta pengaduan lainnya seperti masalah pembacaan meter, pencurian listrik dan lain-lain dengan dua pilihan bahasa Indonesia dan Inggris.

General Manajer PT PLN Disjaya & Tangerang (Persero), Fahmi Mochtar, mengatakan, tujuan dari pengembangan Call Center antara lain mempermudah pelanggan menghubungi PLN Disjaya & Tangerang setiap saat dan manapun, mempermudah pelanggan mendapatkan informasi, mempercepat informasi

guna pemulihan gangguan atau pemadaman, evaluasi *performance* pelayanan serta meningkatkan citra pelayanan PLN di mata pelanggannya.

Dikatakannya, Call Center 123 kini mempunyai 60 saluran telepon dengan jumlah teleponist sebanyak 58 orang yang bekerja pagi, siang dan malam secara bergantian selama 24 jam nonstop dibantu 8 delapan petugas *Dispatcher* dan seorang pengawas.

Namun demikian, lanjut Fahmi jumlah saluran telepon dan petugas tersebut dirasakan masih belum memadai dibandingkan dengan jumlah pelanggan PLN Disjaya dan Tangerang yang mencapai hampir 3 juta pelanggan.

"Pada saat normal saja Call Center 123 dapat menerima tidak kurang dari 8.000 telepon per hari, sedangkan pada saat terjadi gangguan aliran listrik, jumlah telepon yang masuk bisa mencapai 10.000 telepon per hari. Oleh karena itu, PLN Disjaya & Tangerang akan terus meningkatkan kemampuan pusat pelayanan 123 dari segi kuantitas dan kualitasnya," ucapnya.

Menurut dia, salah satu pertimbangan menggunakan akses 123, karena angka 123 tidak hanya mudah diingat, melainkan juga memberikan kemudahan kepada pelanggan saat menghubungi melalui pesawat telepon meski dalam keadaan gelap karena posisi angka 1, 2 dan 3 pada pesawat telepon biasanya berada paling atas dan sejajar. (MAF)

> galeri bisnis



PLN LUNCURKAN CALL CENTRE 123: Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan (DIRAGA) PT.PLN S.A. Aritonang (tengah) didampingi oleh GM.PT PLN Distribusi Jakarta & Tangerang, Fahmi Mochtar (kiri) dan Dir.Jasa PT. Telkom, Suryatin Setiawan, meluncurkan Call Centre 123, sebagai solusi Informasi & Pengaduan bagi pelanggan PLN Jakarta Raya dan Tangerang. (ZAM) : ZAMRI/RI

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 1																																												
TAHUN 2004																																												

Tagihan PLN Asal Tembak

Pada bulan November 2003 kami mengajukan permohonan penyambungan listrik baru untuk dua rumah di Condet, masing-masing 1.300 watt. Pada bulan Desember 2003 langsung dikenakan biaya Rp 34.275 (100 kwh), bulan Januari 2004 sebesar Rp 103.785 (100-233 kwh). Lalu, pada tanggal 6 Januari 2004 kami mengajukan keberatan per lisan kepada pimpinan PLN setempat dan dijamin bahwa sampai pemakaian 233 kwh hanya akan dibebani biaya abonemen.

Benar pada tagihan bulan Februari 2004 hanya dibebani abonemen. Namun, tagihan bulan Maret 2004 sudah

dikenakan biaya pemakaian sebesar Rp 75.745 (233-311 kwh). Padahal, pemakaian sebenarnya baru 50-an kwh. Kita semua merasakan betapa tingginya kenaikan tarif PLN tahun 2003 yang konon untuk menutupi biaya produksi dan untuk meningkatkan pelayanan.

Tapi, tetap saja calo-calo di kantor PLN bergentayangan dan pencatatan pemakaian tidak tertib serta pemborosan terjadi di mana-mana. Lihat lampu penerangan jalan raya masih banyak yang menyala pada pukul 06.00-07.00 WIB. Bisa dilihat di sepanjang jalan menuju tempat saya bekerja, di depan UKI Cawang, Jl Kalibata, maupun Jl Raya Pasar Minggu.

Saya yakin hal tersebut juga terjadi di mana-mana dan berapa pemborosan yang terjadi? Semoga janji PLN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud, bukan hanya sekadar slogan atau alasan untuk membenarkan kenaikan tarif.

Pelanggan nomor 547103932815
dan 547103932823

6

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> INVESTOR IND. <input type="radio"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEPT</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 2																																												
TAHUN 200																																												

Rekening PLN Dipalsukan

Akibat Ulah Oknum KUD, Pelanggan Nunggak 2 s.d. 3 Bulan

INDRAMAYU, (PR).-

Modus kejahatan penipuan dengan mencetak dan menerbitkan rekening tagihan PLN palsu terungkap. Aksi itu melibatkan seorang oknum KUD di Desa Jatisawit Lor, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu.

Menyusul terungkapnya kejahatan itu, Has, oknum KUD "Merdeka" di Desa Jatisawit diringkus Polsek Jatibarang. Oknum itu telah mencetak dan mengedarkan ribuan rekening PLN palsu. Dari aksinya itu tersangka berhasil meraup keuntungan puluhan juta rupiah.

Informasi yang dihimpun "PR", Sabtu (13/3), terungkapnya kejahatan setelah PLN melakukan tindakan tegas. Diawali petugas PLN UPJ Jatibarang yang melakukan operasi tegas terhadap para penunggak rekening.

Hal ini setelah ada catatan kalau di beberapa desa di Jatibarang, terdapat ratusan pelanggan menunggak antara 2 - 3 bulan. Yang tercatat sebagai penunggak 3 bulan, ceritanya akan dieksekusi oleh PLN dengan pencabutan langganan.

Di luar dugaan, saat petugas PLN akan mencabut meteran, diper-

oleh protes dari pelanggan. Yang lebih mengejutkan, pelanggan menyatakan kalau tidak pernah menunggak, mereka juga menunjukkan bukti telah membayar tagihan setiap bulannya.

Saat pelanggan menunjukkan bukti itu kemudian terungkap adanya modus pencetakan rekening PLN palsu. Dari situ, petugas PLN langsung melaporkan ke Polsek Jatibarang.

Setelah ditelusuri, terungkaplah pencetakan rekening PLN palsu melibatkan oknum KUD. Dari situ, Polsek Jatibarang meringkus Has yang menjadi bendahara KUD "Merdeka".

"Kami sempat kaget setelah disodori rekening dari warga yang akan dicabut meterannya. Pantas mereka mencak-mencak saat kami mau mencabut. Rupanya mereka selama ini terus membayar, hanya tidak sampai ke PLN," tutur petugas PLN Jatibarang.

Sekilas rekening yang dicetak tersangka Has mirip, hanya ada kejanggalan pada rekening palsu itu. Lembar rekening listrik palsu tidak tertera tanda tangan Manajer PLN

APJ Cirebon, H. Muhi Yassin.

Manajer PT PLN UPJ Jatibarang, H. Taufik membenarkan soal terungkapnya rekening PLN palsu. Pihaknya telah menyerahkan ke Polsek Jatibarang yang ditindaklanjuti dengan penangkapan salah seorang oknum di KUD bersangkutan.

"Kita sedang menelusuri berapa lembar rekening yang telah dipalsukan. Karena ada kasus penipuan, kami akhirnya tidak jadi mencabut para penunggak. Cuma sementara kita akan mengambil alih pembayaran rekening listrik untuk bulan ini," tuturnya.

Wakapolsek Jatibarang, Iptu Herri membenarkan pihaknya bekerja sama dengan PLN dalam pengungkapan kasus rekening bodong alias rekening palsu. Dari hasil penelusuran, ada dugaan kuat aksi itu melibatkan oknum KUD tersebut.

"Kami dapatkan bukti 97 lembar rekening palsu dengan nilai sekira Rp. 19,3 juta. Kami yakin masih banyak rekening palsu yang beredar dan belum dilaporkan warga," tutur dia.

Warga tak mau bayar ulang Setelah terungkap, warga pe-

nunggak menyatakan enggan bila harus bayar lagi ke PLN. Dalam kasus ini, seperti dituturkan salah satu warga penunggak, Opik Alzero, mereka posisinya sebagai korban.

"Kami jelas keberatan kalau harus bayar lagi. Silakan PLN mencari alternatif pemecahan. Kami bisa minta pertanggungjawaban ke KUD secara kelembagaan, atau oknum bersangkutan disuruh mengganti," tutur dia.

Manajer PT PLN UPJ Jatibarang, Taufik, belum terpikir akan membebaskan ke warga atau pelanggan. Kasus ini telah diserahkan ke polisi, sehingga pemecahannya tergantung hasil pemeriksaan polisi.

"Polsek telah memberitahu kami kalau Has akan mengganti seluruh biaya rekening yang dipalsukan. Kalau memang mau mengganti itu lebih baik, soalnya itu uang negara," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, PLN Jatibarang telah melayangkan surat resmi ke KUD "Merdeka". Pihak KUD juga memberi respon positif untuk secepatnya mengatasi masalah itu. (A-93)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> INVESTOR IND. <input type="checkbox"/>																																											
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> PERTAMB.UMUM DAN GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JAN</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>APR</th> <th>MEI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGST</th> <th>SEPT</th> <th>OKT</th> <th>NOV</th> <th>DES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </tbody> </table>		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
HALAMAN : 5																																												

TAHUN 2004

Fluor garap proyek listrik di Irak

ALISO VIEJO, California (PRNewswire-FirstCall): Fluor Corporation dan AMEC plc mengumumkan kerja sama menyusul diperolehnya kontrak hingga US\$500 juta dari Departemen Pertahanan AS untuk menggarap proyek fasilitas kelistrikan di Irak.

Kontrak tersebut, salah satu dari 10 kontrak konstruksi yang dikeluarkan Coalition Provisional Authority Program Management Office (PMO) untuk lima sektor kelistrikan, pekerjaan umum/air, transportasi/komunikasi, keamanan, gedung/pendidikan/kesehatan.

PMO dipercaya Kongres AS untuk mengelola dana US\$18,4 miliar guna mendukung rekonstruksi infrastruktur di Irak dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas terkait dengan a.l. program, proyek, aset, konstruksi, dan membuka kesempatan kerja bagi warga negara Irak.

"Hal ini merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk menormalisasikan kehidupan masyarakat Irak dan mendukung kesejahteraan dan stabilitas negara itu," kata Alan Boeckmann, Chairman dan Chief Executive Officer Fluor Corporation.

Dalam proyek kerja sama itu, Fluor menguasai 51% dan AMEC 49%. (zuf)

7